

Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Permata Selly Pasa Hartiah^{*}, Alistraja Dison Silalahi

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1,*}sellypasha.11@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: sellypasha.11@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dan juga menggunakan metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Data didapatkan dari laporan keuangan realisasi anggaran pemerintah dan belanja daerah pada Kabupaten/Kota Dalam Angka BPS Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian jika dilakukan secara bersama-sama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Belanja Modal; Realisasi Anggaran; Pengalokasian

Abstract-This study aims to determine the effect of regional original income and general allocation funds on the allocation of capital expenditure in regencies/cities in North Sumatra Province. This type of research uses a quantitative associative approach and also uses secondary data. The population in this study were 33 districts/cities in North Sumatra. The data was obtained from the financial reports on the realization of the government budget and district/city regional spending in North Sumatra's BPS Figures for 2018-2021. The method of determining the sample used is purpose sampling method. The results of the study show that regional original income has a significant effect on the allocation of capital expenditures, while general allocation funds have no significant effect on the allocation of expenditures. The results of the study when carried out jointly show that regional own-source revenues and general allocation funds have a significant effect on the allocation of capital expenditures.

Keywords: Locally-Generated Revenue; General Allocation Fund; Capital Expenditures; Budget Realization; Allocation

1. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang diambil oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Perkembangan kebijakan ekonomi di Indonesia telah memberikan banyak perubahan bagi daerah untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang (Sintia & Suryono, 2019). Menurut (Melas, 2017) pada umumnya, masalah yang dihadapi oleh daerah adalah potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di setiap daerah berbeda-beda sehingga masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Sejalan dengan dasar otonomi daerah, pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dengan harapan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan sendiri sesuai dengan yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Sestu Rahajeng et al., 2021). Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu periode anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Kuntandi et al., 2022). Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program (Hasnur, 2016).

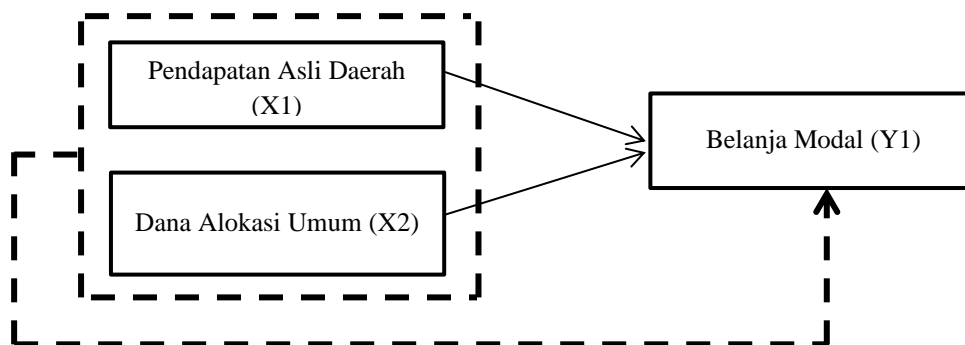
Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan yang dihasilkan untuk dibelanjakan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Seharusnya pemerintah membelanjakan pendapatannya untuk pengeluaran yang bersifat komersial yaitu untuk pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan utama anggarannya digunakan untuk belanja yang dimanfaatkan dan dipakai langsung oleh masyarakat seperti belanja modal. Namun selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk belanja operasi daripada belanja modal (Yossi Mamonto et al., 2013). Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah (Hasnur, 2016). Di Sumatera Utara pada tahun 2021 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 10.167.272.667.000 sedangkan belanja modalnya sangat jauh berbeda hanya sebesar Rp 1.145.566.552.000 (BPS Sumatera Utara). Mengalokasikan sumber daya dalam anggaran belanja modal sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi masalah lain yang dihadapi ialah adanya kepentingan politik dari pihak lembaga legislatif yang bersangkutan dalam proses penyusunan anggaran yang mengakibatkan alokasi belanja modal ada kekeliruan dan seringkali tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Wandira, 2013). Melihat

permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menurut (Masdiasmo, 2012) saat ini pemerintah daerah masih banyak mengalami masalah yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebetulnya PAD terhadap belanja modal, apakah disebabkan oleh rendahnya PAD atau alokasi yang kurang tepat. Dari data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara antara 2017-2021 menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal. Potensi keuangan daerah yang tidak sama antar daerah menimbulkan kesenjangan keuangan yang dapat menimbulkan kesenjangan keuangan yang dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan, muncul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah. Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemerintah daerah sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Instrumen penelitian digunakan dalam mengumpulkan data, dalam pengujian hipotesis yang sudah ditetapkan menggunakan analisis data bersifat statistik. Lokasi penelitian ini terletak di Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dari bulan agustus sampai dengan desember 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen resmi instansi. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dan data jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2), dengan satu variabel dependen yaitu belanja modal. Berikut kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.1 Variabel Penelitian

Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) merupakan dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Lado & Budiantara, 2018) Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi, menyebabkan atau timbul dari variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu: pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan bersumber di dalam wilayahnya sendiri yang dihimpun berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dana alokasi umum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dependen menurut Sugiyono (2017:39) adalah sebagai variabel tidak bebas/dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PAD, DAU, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 25 Kabupaten dan 8 Kota sehingga daerah total populasi adalah 33 daerah.

Sampel adalah komponen dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil populasi yang karakteristiknya akan diteliti dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang memperhitungkan sejumlah faktor yang biasanya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang memiliki data laporan realisasi anggaran lengkap pada Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2018-2021. Sehingga mendapatkan jumlah sampel yaitu 4 tahun x 10 daerah = 40 data sampel.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara individu maupun instansi (Anwar, 2016:114). Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2021 yang diperoleh dari situs website Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id).

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan SPSS 25. Ada beberapa tahapan yang akan digunakan yaitu uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokolinieritas. Sedangkan uji hipotesis juga terdiri beberapa uji yaitu koefisien determinasi, uji f (simultan) dan uji t (parsial).

2.5 Hipotesis

Peneliti telah merancang beberapa hipotesis berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal**
 Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat, hal ini dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan bersumber dari dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal
- b. Pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal**
 Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan yang berupa dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan (Rosmayanti et al., 2022) menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal.
H₂ : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal
- c. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal**
 Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam mengalokasikan belanja modal yang sangat berguna untuk pelayanan kepada masyarakat.
H₄ : Pendaptan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah data (N) yang diuji sebanyak 40, diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_PAD	40	23,72	28,28	25,4933	1,29623
LN_DAU	40	26,49	28,16	27,2391	0,52033
LN_BM	40	24,02	27,62	25,9961	0,84951
Valid N (listwise)	40				

Nilai minimum dan maksimum pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 23,72 dan 28,28. Nilai minimum terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 23,72 atau Rp 20.060.000, sedangkan nilai maksimum terdapat pada Kota Medan yaitu sebesar 28,28 atau Rp 1.906.510.000.000. Nilai median dari variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 25,4933 dengan nilai standar deviasi dari variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,29623. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 26,49 dan 28,16. Nilai minimum yang terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 26,49 atau Rp

318.570.000, sedangkan nilai maksimum terdapat pada Kota Medan sebesar 28,16 atau Rp 1.690.980.000.000. Nilai median dari variabel dana alokasi umum adalah sebesar 27,2391 dengan nilai standar deviasi dari variabel dana alokasi umum adalah sebesar 0,52033. Nilai minimum dan maksimum belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara adalah 24,02 dan 27,62. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 24,02 atau Rp 26.920.000.000, sedangkan nilai maksimum belanja modal terjadi pada Kota Medan sebesar 27,62 atau Rp 992.660.000.000. Nilai median atau rata-rata belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 25,9961 dengan nilai standar deviasi dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,84951.

Tabel 2. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	94526,058
	Absolute	0,085
Most Extreme Differences	Positive	0,085
	Negative	-0,078
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

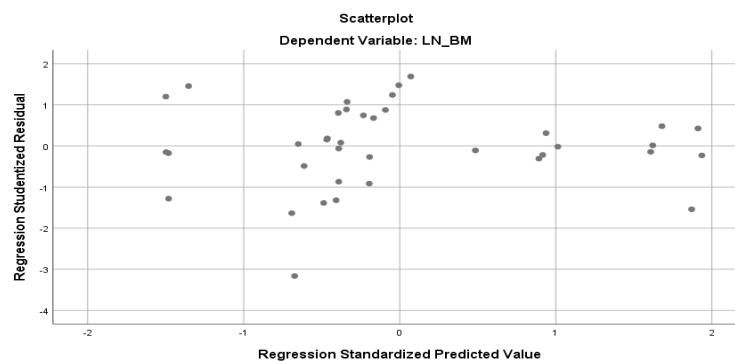
Berdasarkan hasil tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data dianggap normal. Sehingga asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Tabel 3. Uji Multikolineritas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	LN_PAD	,693	1,443
	LN_DAU	,410	2,437

a. Dependent Variable: LN_BM

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk seluruh variabel dibawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat gejala multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebut di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,885 ^a	,784	,744	87,75204	2,178

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin Watson* adalah sebesar 2,178. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikan 5% jumlah sampel 40 dan jumlah variabel independen 2. Oleh karena nilai DW 2,178 lebih besar dari batas atas (du) 1,6589 dan kurang dari (4 - du) 2,3411 atau $1,6589 < 2,178 < 2,342$, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
	(Constant)	23,176	7,418	3,124	0,004
1	LN_PAD	0,83	0,242	3,425	0,002
	LN_DAU	-0,816	0,475	-1,72	0,098

a. Dependent Variable: LN_BM

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu nilai *intercept konstanta* sebesar 23,176. Hasil ini dapat berarti bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka jumlah belanja modal tiap daerah adalah sebesar 23,176 (dalam jutaan rupiah). Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,830 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,830 atau sebesar 83,1%. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar -0,816, Karena berjumlah negatif berarti setiap ada kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar -0,816 atau -81,6%.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,885 ^a	0,784	0,744	87,75204	

a. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_DAU
 b. Dependent Variable: LN_BM

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,885 menunjukkan bahwa kolerasi atau kekuatan hubungan linear antar variabel merupakan kolerasi yang kuat antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal dan di lihat koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,784. Hal ini berarti 78,4% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya (100% - 78,4% = 21,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Tabel 7. Uji f (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	6,747	3	2,249	19,34	,000 ^b
1	Residual	2,907	37	0,116		
	Total	9,654	40			

a. Dependent Variable: LN_BM
 b. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_DAU

Dari tabel 7, dapat dilihat untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang mempunyai F_{hitung} sebesar 19,340 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,005$) dan F_{hitung} sebesar 19,340 $> F_{tabel}$ sebesar 2,802 yang artinya H4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel 8. Uji t (Parsial)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	23,176	7,418		3,124	,004
	LN_PAD	,830	,242	,902	3,425	,002
	LN_DAU	-,816	,475	-,543	-1,720	,098
	LN_JP	,316	,088	,595	3,605	,001

a. Dependent Variable: LN_BM

Dari tabel 8 dapat dijelaskan bahwa hasil uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,124 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} 3,425 $> t_{tabel}$ sebesar 1,687 yang menunjukkan H1 diterima sehingga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar -1,720 dengan signifikansi sebesar 0,098. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} -1,720 $< t_{tabel}$ sebesar 1,687 yang menunjukkan bahwa H2 ditolak sehingga Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,605 dengan signifikansi sebesar 0,001.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021”, terbukti Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka nilai signifikan sebesar 0,002 dimana lebih rendah dari 0,05. Nilai $t_{hitung} 3,425 > t_{tabel} 1,687$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh (Soesilo & Asyik, 2022) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi” yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Menurut (Masdiasmo, 2012:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021”, tetapi dari hasil penelitian yang diperoleh, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari uji t pada tabel 8, signifikan sebesar 0,098 dimana nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05. Nilai $t_{hitung} 1,720 < t_{tabel} 1,687$, sehingga hipotesis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal ditolak, ini berarti naik turunnya DAU tidak mempengaruhi Belanja Modal, ini disebabkan oleh penerimaan Dana Alokasi Umum lebih kearah belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Dari analisis deskriptif memang penerimaan dari Dana Alokasi Umum sangat besar dibandingkan pendapatan yang lain, terlihat rata-rata sebesar 27,239 atau Rp 817.298.125.000, tetapi sudah dijelaskan sebelumnya dilatar belakang masalah penelitian, bahwa belanja operasinya sangat tinggi yang sangat jauh lebih besar daripada Belanja Modalnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suryani & Pariani (2018) yang menyatakan Dana Alokasi Umum daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal, sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosmayanti et al., 2022) yang menyatakan, secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal karena pemerintah daerah memakai Dana Alokasi Umum untuk belanja lain seperti belanja pegawai dan lainnya. Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan maksud untuk meningkatkan distribusi keuangan antar daerah untuk membiayai keperluan daerah berhubungan dengan kegiatan desentralisasi.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan pengujian simultan (f), variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hal ini, dapat dilihat dari uji pada tabel 7, signifikansi senilai 0,000 berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi ($R Square$) pada tabel 6 sebesar 0,784. Hal ini berarti 78,4% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sedangkan sisanya ($100\% - 78,4\% = 20,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

4. KESIMPULAN

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dikarenakan pendapatan dari dana alokasi umum lebih diarahkan ke belanja operasi. Dan secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Adapun keterbatasan yang dihadapi pada penelitian ini adalah keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap tiga variabel independen sehingga perlu dikembangkan dan diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel yang lebih beragam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan, kerjasama dari berbagai pihak, khususnya para dosen dilingkungan fakultas ekonomi prodi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah memberikan masukan atas penyempurnaan dari tulisan ini, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

REFERENCES

- Anwar, S. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cetakan Ke). Salemba Empat.
- Hasnur, A. F. (2016). `Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin*, 53(9), 31.

- Kuntandi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3), 269–280.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Masdiasmo. (2012). Public Sector Accounting. In *Penerbit Andi*.
- Melas, A. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupate/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis* 5.
- Purwanto. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ekonomi Bisnis*. Pustaka Pelajar.
- Rosmayanti, Haliah, H., & Kusumawati, A. (2022). 289-Article Text-981-1-10-20221208. *Economics and Digital Business Riview*, 4(1), 42–51.
- Sestu Rahajeng, A., Martha Hendrati, S.E., M.E., D. I., & Asmara, S.E., MM., K. (2021). D. Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.54980/imkp.v4i1.117>
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BANTUAN PROVINSI, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI Nur Fadrijh Asyik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 10.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1). <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/det>
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2004). *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004. (2004). *International Journal of Tropical Insect Science*, 8(4), 104–110.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51.
- Yossi Mamonto, S., Kalangi, & D. Tolosang, K. (2013). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal*. 1–14.